



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA PANJA PERGURUAN TINGGI
KOMISI X DPR RI KE UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
Tanggal 26 s.d. 28 Januari 2023

I. PENDAHULUAN

Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI sebagai mitra Kemendikbudristek RI, sebagaimana keputusan Rapat Intern Panja tanggal 10 Januari 2023, telah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan (Universitas Lambung Mangkurat).

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI Tentang Pembentukan Panja Perguruan Tinggi Swasta pada 6 Juli 2022.
12. Rapat Intern Panja Panja Perguruan Tinggi Swasta pada 22 Agustus 2022.
13. Rapat Intern Komisi X DPR RI 10 Januari 2023.

B. Tujuan

Melaksanakan fungsi pengawasan Komisi X DPR RI di bidang pendidikan, dan kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pendalaman substansi pada pembahasan Panitia Kerja Perguruan Tinggi, serta menggali secara langsung informasi aktual di perguruan tinggi, terutama di wilayah Kalimantan Selatan.

C. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dipimpin oleh Dr. Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc. dari Fraksi Partai Gerindra. Hadir Pejabat dari Mitra Kerja Komisi X DPR RI yaitu Dr. Ir. Sri Gunani Partiw, M.T (Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Dikti Kemendikbudristek RI. Tim juga didampingi juga oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. TEMUAN PERMASALAHAN

Dalam kunjungan ke Kalimantan Selatan, beberapa hal yang menjadi masukan penting bagi pengembangan Pendidikan Tinggi, antara lain:

1. Rektor Universitas NU Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa masukan antara lain:
 - a. Bahwa kondisi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan saat ini tentu mengalami kemajuan salah satunya dari segi akreditasi telah terakreditasi minimal yang dibuktikan dengan SK BAN PT Nomor 2034/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/XII/2022.
 - b. Tantangan yang saat ini dihadapi oleh UNU Kalsel yaitu harus meningkatkan jumlah dosen yang berjabatan fungsional dan meningkatkan jumlah dosen yang berjabatan fungsional dan meningkatkan kemampuan mahasiswa agar menguasai keahlian sesuai program studi yang di ikuti.
 - c. Pola pembinaan yang harus diterapkan di perguruan tinggi mengacu ke PP 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaaan Pendidikan Tinggi adalah PP untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 68 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - d. Upaya yang dilakukan UNU Kalsel diantaranya dengan cara mahalnya biaya Pendidikan di PTS dan UNU menetapkan standar biaya diwilayah Kalsel dan pemotongan nominal yang harus dibayarkan ke perguruan tinggi.
 - e. Biaya akreditasi PTS saat ini di UNU masih 3 program studi yang belum diakreditasi LAM PT, berharap pembiayaannya dapat dibantu.
 - f. Dalam menjaga kualitas dan mutu PTS, dilakukan dengan revisi kurikulum yang disesuaikan dengan pasar dan meningkatkan kapasitas Dosen.
 - g. Kekurangan SDM (Dosen) baik secara kualitas dan kuantitas, adalah permasalahan di UNU karena pendapatan yang terbatas mempengaruhi pada gaji sehingga sulit untuk memberatkan dosen dan hanya menuntut kewajiban dosen agar dilaksanakan.
 - h. Masukan kedepan dalam upaya penguatan dan keberpihakan Pemerintah dalam pengelolaan PTS yaitu memperbanyak peluang keikutsertaan PTS dalam pelatihan maupun seminar yang diselenggarakan agar PTS mampu meningkatkan SDM, melakukan pemerataan akses mutu (quality) agar PTS dapat berdaya saing, relevan, inovatif dan mampu berkompetisi.
2. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
 - a. Universitas Lambung Mangkurat memiliki 34 ribu mahasiswa, total mahasiswa di Kalimantan Selatan hampir sebanyak 98 ribu. Lebih dari 3000 Dosen dengan kualifikasi Dosen ada 369 strata S3 atau Doktor, hanya ada

- 10 guru besar, 72 guru besar dengan target tahun ini ULM memiliki 100 Guru Besar, saat ini prodi ada 180 rogram studi.
- b. Yang diperlukan kedepan adalah membuka pasca sarjana untuk percepatan SDM namun dengan adanya kewajiban publikasi maka akan cukup menyulitkan.
 - c. Yang terberat dihadapi dosen adalah publikasi internasional yang terindeks scopus, walaupun tidak harus scopus namun yang selevel indeksinya.
 - d. Dosen yang tidak mengajukan pangkat 3 tahun terakhir sangat banyak, dengan alasan pertama, keasyikan di luar kampus, sebagai Rektor Universitas Lambung Mangkurat akan saya surati agar semua dosen mengurus kenaikan pangkat karena berimplikasi terhadap pendapatan, kedua faktor motivasi, mengingat jumlah gaji yang tidak besar, jadi sebenarnya kasian seperti Rektor hanya tugas tambahan dengan gaji 5 juta.
 - e. Terkait program MBKM 485 yang sudah mendaftar padahal tahun lalu hanya 62 orang yang mendaftar MBKM, dalam manajemen perlu ada sekretariat di universitas sampai ke fakultas sehingga kebijakannya satu pintu.
 - f. Seleksi mandiri adalah pekerjaan yang paling mudah asal tidak ada titipan dari mana-mana, perlu standar, dan ada masa sanggah 5 hari terbuka untuk komplek jika ada yang merasa lebih pintar dari yang terpilih lulus.
3. Perwakilan Kemendikbudristek RI Ibu Sri Gunani Partiwu menyampaikan beberapa masukan antara lain:
 - a. Untuk menjadi rektor sebaiknya memang harus sudah selesai dengan dirinya sendiri terlebih dahulu.
 - b. Jurnal internasional tidak harus terindeks scopus namun bisa selevel scopus indeksinya.
 - c. Konsepnya MBKM dibuat Kemendikbudristek masih secara umum dan untuk menjadi pilihan-pilihan belum diwajibkan untuk semuanya hanya disarankan kepada perguruan tinggi yang siap melaksanakan MBKM.
 4. Komisi X DPR RI melalui tim kunjungan kerja, menyampaikan pandangan:

Sodik Mudjahid:

 - a. Bagaimana kondisi dan perkembangan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan?
 - b. Apa kendala dan tantangan perguruan tinggi khususnya terkait dosen?
 - c. Panja Komisi X DPR RI sebelumnya adalah Panja PTS namun karena ada kasus di Universitas Lampung terkait seleksi mandiri, bagaimana pandangannya terkait seleksi mandiri di PTN?

Andreas Hugo Pareira:

 - a. Seleksi mandiri adalah hal yang mudah dilakukan asalkan tidak ada faktor x.
 - b. Agar tetap objektif, jika perguruan tinggi berani bersuara untuk lurus tidak menerima yang tidak seharusnya tidak lulus maka kita akan mendukung, karena tidak mungkin bisa menerima calon mahasiswa dibawah *pasing grade* jika tetap diterima karena kasihan terhadap mahasiswa tersebut sebab pastinya akan kesulitan mengikuti perkuliahan.

III. KESIMPULAN

Kondisi dan perkembangan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan secara umum baik. Beberapa masukan terkait perguruan tinggi di Kalimantan Selatan diantaranya adalah (1) perlunya percepatan penyediaan dan atau distribusi SDM dosen yang

berkualifikasi doktor dan guru besar (profesor), (2) Berharap ada bantuan pembiayaan akreditasi program studi, (3) Mendorong peningkatan kesejahteraan dosen agar termotivasi dalam mengurus kenaikan jabatan fungsional, dan (4) seleksi jalur mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. REKOMENDASI

Untuk peningkatan kualitas dan pengembangan Pendidikan Tinggi diluar Jawa, Komisi X DPR RI mendesak kepada Kemendikbudristek RI untuk membuat skema percepatan penyediaan dan atau distribusi SDM dosen yang berkualifikasi doktor dan guru besar (profesor), membantu pembiayaan LAM, memperhatikan peningkatan kesejahteraan dosen, dan seleksi jalur mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

Demikian laporan Laporan Kunjungan Kerja Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Kalimantan Selatan, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan rekomendasi hasil Panja.

Jakarta, 29 Januari 2023

Ketua Tim/Anggota Komisi X DPR RI

Ttd.

Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.

A-80